

Bidang Unggulan PT: Seni Dan Budaya

Kode/ Nama Rumpun Ilmu: 580/Ilmu SosialHumaniora

Abstrak, Executive Summary, dan Artikel

LAPORAN PENELITIAN DOSEN PEMULA



Alun-alun Kota:

*Tentang Ruang Publik, Artikulasi
Dan
Hibridasi Kebudayaan Kaum Muda Jember*

PENELITI:

Hery Prasetyo, S.Sos., M.Sosio 0004048302

**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS JEMBER
JANUARI 2015**

Abstrak

Judul : **Alun-alun Kota:**
*Tentang Ruang Publik, Artikulasi Dan
Hibridasi Kebudayaan Kaum Muda Jember*

Peneliti : Hery Prasetyo, S.Sos., M.Sosio¹

Sumber dana : DIPA BOPTN 2014

Kontak email : Heryprasetyo83@gmail.com

Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas perkembangan alun-alun Jember sebagai bagian dari perkembangan modernitas dan gerak pembangunan. Secara spesifik penelitian ini akan mendiskusikan tentang bagaimana warga Jember mengartikulasikan praktik kebudayaannya. Penelitian ini menjadi menarik, khususnya pada bagaimana alun-alun kota Jember saat ini tidak dapat dilepaskan sebagai bagian yang dibicarakan dan melekat pada identitas masyarakat Jember, hal ini ditampakan dengan adanya event-event kebudayaan, baik dalam konteks pariwisata ataupun penyelenggaraan kegiatan nasional yang kerap diadakan dan berpusat di alun-alun kota Jember. Sementara disisi lain alun-alun kota, merupakan tempat yang secara teoritik dikonseptualisasikan sebagai ruang publik, disaat bersamaan hal ini dimaksudkan untuk menghadirkan aksesibilitas bagi publik untuk mendapatkan ruang terbuka yang murah, nyaman dan manusiawi. Adanya kapitalisasi publik tampak jelas ditampilkan di dalam dan menyertai artikulasi budaya, terutama pada mereka hendak mendapat akses pada ruang publik. Urgensi dari penelitian ini terletak pada bagaimana ruang publik kota dibicarakan sebagai bagian yang pasif dan dapat dimasuki oleh permodalan, sehingga bentuk artikulasi yang muncul semakin dijauhkan dan menjauh dari akar kebudayaan kota. Disisi lain ketertinggalan dari yang kota dengan yang kampung dan terlebih desa berkonsekwensi pada penjarakan subjek pada karakter kota yang sedang dibentuk. Hal ini kemudian berujung pada mempertontonkan adanya kesadaran modernis yang dipisahkan dengan tradisi yang lokalitas. Melalui penelitian ini, persoalan yang kemudian melekat pada kehadiran subjek dengan formasi kehadiran yang merepresentasikan ideologi yang kosong dan berlompatan pada ruang kekinian, yang secara spesifik kemudian menampilkan lack of subjektiviti dan cultural loop. Dalam konteks ruang kultural pada lokalitas postkolonialistik, hal ini menandakan adanya tarikan atau interpelasi subjek yang berada pada ruang lokal untuk menjadi dan sejalan dengan yang global. Tetapi globalitas yang dibayangkan selalu direpresentasikan oleh ikon metropolistik dan elitis.

Key Word: *Cultural Articulation, Politicks of Culture, Identity of The Youth.*

¹ Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember

Abstract

This research was meant to discuss development of Alun-Alun Jember. Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas perkembangan alun-alun Jember sebagai bagian dari perkembangan modernitas dan gerak pembangunan. Secara spesifik penelitian ini akan mendiskusikan tentang bagaimana warga Jember mengartikulasikan praktik kebudayaannya. Penelitian ini menjadi menarik, khususnya pada bagaimana alun-alun kota Jember saat ini tidak dapat dilepaskan sebagai bagian yang dibicarakan dan melekat pada identitas masyarakat Jember, hal ini ditampakan dengan adanya event-event kebudayaan, baik dalam konteks pariwisata ataupun penyelenggaraan kegiatan nasional yang kerap diadakan dan berpusat di alun-alun kota Jember. Sementara disisi lain alun-alun kota, merupakan tempat yang secara teoritik dikonseptualisasikan sebagai ruang publik, disaat bersamaan hal ini dimaksudkan untuk menghadirkan aksesibilitas bagi publik untuk mendapatkan ruang terbuka yang murah, nyaman dan manusiawi. Adanya kapitalisasi publik tampak jelas ditampilkan di dalam dan menyertai artikulasi budaya, terutama pada mereka hendak mendapat akses pada ruang publik. Urgensi dari penelitian ini terletak pada bagaimana ruang publik kota dibicarakan sebagai bagian yang pasif dan dapat dimasuki oleh permodalan, sehingga bentuk artikulasi yang muncul semakin dijauhkan dan menjauh dari akar kebudayaan kota. Disisi lain ketertinggalan dari yang kota dengan yang kampung dan terlebih desa berkonsekwensi pada penjarakan subjek pada karakter kota yang sedang dibentuk. Hal ini kemudian berujung pada mempertontonkan adanya kesadaran modernis yang dipisahkan dengan tradisi yang lokalitas. Melalui penelitian ini, persoalan yang kemudian melekat pada kehadiran subjek dengan formasi kehadiran yang merepresentasikan ideologi yang kosong dan berlompatan pada ruang kekinian, yang secara spesifik kemudian menampilkan lack of subjectivity dan cultural loop. Dalam konteks ruang kultural pada lokalitas postkolonialistik, hal ini menandakan adanya tarikan atau interpelasi subjek yang berada pada ruang lokal untuk menjadi dan sejalan dengan yang global. Tetapi globalitas yang dibayangkan selalu direpresentasikan oleh ikon metropolistik dan elitis.

Executive Summary

- Judul** : **Alun-alun Kota:**
*Tentang Ruang Publik, Artikulasi Dan
Hibridasi Kebudayaan Kaum Muda Jember*
- Peneliti** : Hery Prasetyo, S.Sos., M.Sosio²
- Sumber dana** : DIPA BOPTN 2014
- Kontak email** : Heryprasetyo83@gmail.com

Diskursus pembangunan hadir dalam sebuah bentang diskursif antara sebuah sistem pengetahuan dengan praktek yang menopangnya. Melalui asumsi ketakterpisahan antara keduanya, berbagai keterputusan teori dan praktek, selalu muncul dan menarik untuk difikirkan. Dalam semangat inilah penelitian ini

² Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember

disusun dan sekaligus dimaksudkan untuk mengintordusir gagasan tentang praktek demokrasi dan pembangunan yang secara spesifik membahas tentang Jember dan Ruang Publik yang terpolitisasi.

Sementara demokrasi diposisikan sebagai model praktek berpolitik yang menghadirkan ruang diskursif bagi subyek bernegara. Dengan pengertian ini, demokrasi berada dan selalu berubah untuk merentangkan sebuah bentuk bagi dirinya dan bentuk yang dihadapkan pada yang non demokratis. Apa yang kemudian diposisikan sebagai entitas lokal dan partikural diabsorpsi oleh praktik berpolitik yang menjadi wacana global ini. Artinya demokrasi bukan hanya direduksi menjadi persoalan praktek demokrasi ketika berhadapan dengan sistem politik diluar demokrasi, melainkan dengan mempertanyakan keberadaan demokrasi itu sendiri, terutama pada bagaimana dirinya menempatkan apa yang universal dihadapan yang partikular. Karenanya demokrasi menghadirkan sebuah bentang historis mengenai *Modernity Project* dalam menempatkan Manusia Universal dan Sistem Keberadaannya³, sehingga kehadiran demokrasi selalu berarti sebuah pertarungan antara yang lokalistik-partikularistik dengan yang Global-Universalistik. Pertanyaannya kemudian bagaimanakah hari ini relasi yang terbangun dari bentuk pertarungan tersebut?

Untuk mengurai dan menyusun sebuah narasi yang diperuntukan bagi pertanyaan di atas, peneliti menempatkan Jember sebagai basis analisis. Penelitian ini tidak dimaksudkan menghadirkan Jember sebagai satu bentuk tunggalnya, melainkan menghadirkan Jember sebagai ruang diskursif bagi Pembangunan dan Demokrasi, yang diartikulasikan dalam formasi hibriditas atau yang secara konseptual disebut sebagai Pandhalungan. Sedangkan metode yang dipergunakan dalam penulis adalah Diskursus⁴. Dengan diskursus penulis hendak menghadirkan Jember sebagai ruang dan realitas yang terbentuk melalui pertarungan Kuasa/Pengetahuan, yang tampil sebagai praktek keseharian. Sebuah praktek keseharian adalah kondisi bagi tampilnya Jember dengan historisitas yang membentuknya dan menempatkan subyek dalam kompleksitas relasi Global-Lokal.

Dengan pengertian tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menghantarkan sebuah diskursus praktik demokrasi dan Yang Politis, dalam ketakterpisahannya antara Global-Lokal. Point penting artikel ini ialah, Jember hadir dalam sebuah kondisi Kolonialitas. Artinya praktek keseharian yang ada dan terbentang, membentuk kesadaran subjek. Dan semangat Jember sebagai sebuah

³ Dalam konteks ini penulis merujuk pada bagaimana gagasan tentang kehadiran manusia modern yang berberani mengarahkan pengetahuannya atau rasio bagi pembentukan ruang universal bagi manusia modern, dalam pengertian Kant, kondisi manusia modern dilekati dengan konsep Pencerahan dan Ruang Universal baginya dilekati dengan konsep Cosmopolitan. Untuk bacaan lebih lanjut, bandingkan dengan Teks dari Kant, Immanuel. *On History*. Indianapolis, New York. The Bobbs-Merril, co inc, 1963.

⁴ Diskursus yang dimaksudkan Penulis, dirujukan pada pemikiran Foucault, dimana secara epistemologis Foucault menempati ruang Poststrukturalism, yang artinya Pembacaan Foucault akan kesejarahan dan teks, berbasis pada bagaimana sebuah sejarah hadir dalam pertarungan antara Kuasa/Pengetahuan, yang terus-menerus menempatkan manusia dalam subjektifitas pada dirinya, pada pemenuhan kehendak berkuasanya. Dalam konteks penelitian ini, berarti demokrasi selalu berada pada ruang kehadiran subjektifitas dan tanpa kebertunggalan subjek.

kesadaran Postkolonialitas, yang berkonsekuensi pada bagaimana artikulasi subjek menjadi bagian dari kesadaran yang dihidupi tanpa dirujukan pada historisitas, yakni pada kekinian yang ditarik pada semangat metropolis sementara disaat yang bersamaan representasi dari yang metropolis ini merujuk pada ketercepatan penyebaran imaje yang bergerak dalam ruang global. Secara paradoksal, kondisi ini hanya tampil dalam ruang-ruang publik yang diidentikan menyerupai kota di Jember, sementara pertarungan atikulasi dan ruang bagi tampilnya imaje lokal semakin ditiadakan oleh bentuk kesadaran kaum muda di Jember.

Jember dan Diskursifitas Keruangan

Penulis memilih Jember sebagai ruang diskursif, antara lain dikarenakan jarak Jember dengan pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, yang berjarak +/- 200 Km. Yang artinya Jember secara Geopolitik berada diluar lingkup pengawasan Pemerintah Provinsi, terlebih dari Pemerintah Pusat. Dengan kondisi tersebut, Jember menjadi sebuah ruang diskursus antar subjek bagi kehadiran kehendaknya, hal ini terlihat dari berbagai kasus yang terjadi didalamnya, mulai dari kasus Korupsi yang menimpa Elit Lokal hingga Ketimpangan yang terjadi; Kemiskinan, Reforma Agraria, Pendidikan dan Kesehatan. Tetapi hal tersebut tidak serta-merta membuat Jember menjadi wilayah “lain” bagi penyemaian moralitas. Jember tampil menjadi ruang yang memungkinkan ketidakmungkinan pada basis materialitasnya, terlebih ditopang dengan arah perkembangan wilayah yang hendak meraih “indikator” modern.

Apakah permasalahan yang berada dan terjadi di Jember memiliki konsekuensi pada permasalahan Geopolitik? Tentu saja hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi antara ruang Geopolitik dengan Ekonomi Sosio Kultural yang ada, dengan kata lain kondisi yang terjadi merupakan kondisi Basis-Stuktur masyarakat. Dengan mengintrodusir permasalahan Basis-Stuktur, Jember dapat diletakan pada bentang historis keberadaannya. Dalam konteks ini, penulis akan memulainya pada praktek kolonialitas yang terjadi di Jember.

Dalam catatan sejarah, kewilayahan Jember pernah dicatat oleh Mpu Prapanca dalam Negara Kartagama. Mpu Prapanca mengisahkan perjalanan Raja Hayam Muruk pada 1359 di daerah Sadeng dan di Kota Bacok, dimana kedua wilayah tersebut saat ini bernama Puger dan Watu Ulo, yang berada pada selatan Jember⁵. Sementara dalam tahun 1674, tercatat di wilayah Demung – yang saat ini dikenal dengan nama Besuki – terdapat pelarian dari Gowa yang mendarat dan bertempat tinggal hingga mengumpulkan kekuatannya untuk berkerja sama dengan dengan Trunajaya untuk menyerang dan menguasai pelabuhan-pelabuhan Jawa⁶.

Besuki dalam konteks kesejarahan Jember, merupakan titik bagi bagaimana Kolonialitas membentuk kondisi Basis-Struktur. Belanda selain melakukan perluasan kewilayahan dalam bentuk penguasaan dan berkerja sama dengan pemimpin local, juga memulai perdagangan komoditas. Pada 1677,

⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). *Dalam Perkembangan Kabupaten Jember, Buku I, Dokumen Sampai Dengan 1971*. Hal 14-18.

⁶ Ricklefs, M, C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2009. Hal 162.

Belanda memasukan opium sebagai komoditas dengan bersaing dengan pedagang opium dari Cina. Hingga tahun 1889, Belanda yang salah satunya mendapat dorongan dari pedagang Opium Cina, mengeluarkan sebuah dokumen yang berisi tentang pembentukan pemburu Opium. Pemburu opium ini berkerjasama dengan pemerintah local, untuk menangkap dan memerangi penyelundupan Opium, perintah ini pun sampai pada kewilayahan Karisidenan Besuki. Sepuluh tahun setelah perintah ini terbentuk dan dilaksanakan, atau tepatnya pada tahun 1896 perdagangan Opium yang dikuasai pedagang Cina mengalami kebangkrutan⁷.

Jember bukan hanya dilihat sebagai daerah yang menjadi pasar bagi Komoditas yang dibawa oleh bangsa asing. Kewilayahan Jember sebagai daerah yang subur, menampilkan sebuah kesempatan bagi Belanda untuk terus mengeksploitasi dan mengembangkan Jember sebagai daerah produsen bagi komoditas yang bernilai jual tinggi. Dari kondisi yang ada, setidaknya muncul migrasi ke Jember, data yang tercatat pada tahun 1870 jumlah penduduk Jember meningkat pesat, dari yang semula berjumlah 10.000 Jiwa pada 1820, berlipat menjadi 100.000 Jiwa⁸.

Peningkatan jumlah penduduk di wilayah Jember, berkaitan dengan kemunculan tanah partekelir atau tanah yang dimanfaatkan oleh pihak swasta untuk perkebunan. Tercatat pada tahun 1859 George Birnie mendirikan perkebunan tembakau pertama⁹. Dengan dibukanya perkebunan, mendorong diperlukannya tenaga kerja dan percepatan sarana distribusi dan produksi. Untuk mempercepat proses produksi, Belanda membangun Jalur Kereta Api pada akhir abad XIX, dari Surabaya-Probolinggo-Lumajang-Klakah-Jember-Bondowoso-Panarukan-Situbondo sampai dengan Banyuwangi¹⁰.

Gelombang kedatangan tenaga kerja ke Jember didominasi oleh Etnis Jawa Mataraman yang pada mulanya berkerjasama sebagai tenaga pembuat jalur kereta api yang kemudian mereka berada pada daerah-daerah persawahan, Etnis Madura dalam kedatangannya ke Jember banyak berkerjasama dan diperkerjakan untuk diwilayah perkebunan dan pergudangan Tembakau. Selain kedua Etnis yang datang dan didatangkan ke wilayah Jember, terdapat beragam Etnis Lain, seperti Suku Osing yang bergaris darah dengan kerajaan Blambangan, Suku Osing mendiami daerah Puger¹¹.

Dalam bentang historis kewilayahan Jember, Etnisitas yang mendatangi Jember bukan hanya Jawa dan Madura, tetapi juga Suku Osing, Suku Bugis yang masuk melalui daerah Besuki. Sedangkan dalam perkembangan materialistinya, Jember berubah menjadi wilayah yang didatangi dikarenakan erbukanya kesempatan untuk mengakumulasi modal, sebagaimana bangsa Eropa dan Timur Jauh dan Cina.

⁷ Permasalahan perdagangan Opium dan Jaringan di Jawa, dapat dibaca lebih lanjut dari karya, Rush, James, R. *Opium to Java: Jawa dalam Cengkraman Bandar-Bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910*. Yogyakarta, MataBangsa, 2000.

⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). *Ibid*.

⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). *Ibid*. Bandingkan dengan Yuswadi, Hary. *Melawan Demi Kesejahteraan: Perlawanan Petani Jeruk Terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Jember, Kompyasida, 2005. Khususnya pada Bab II “*Jember dan Perkebunan Belanda*”.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ *Ibid*.

Yang Politis; *Ruang Kewilayahan dan Mitos Identitas Pandahlungan*

Jember dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan wilayah merupakan wilayah yang berasal dari sebuah ruang produksi. Maksimalisasi ruang produksi yang dilakukan oleh Belanda berujung pada perkembangan wilayah Jember. Ruang produksi dalam konteks ini menghadirkan adanya sarana produksi yang berbentuk pendatangan pekerja, pembuatan sarana transportasi, baik jalur kereta api maupun jalur jalan darat Anyer-Panarukan¹².

Perlu dicatat bahwa perkembangan Jember sebagai sebuah Kabupaten tidak terjadi dengan sendirinya, terdapat tahapan-tahapan administrative yang menyertai dan membentuk Jember sebagai Ruang Produksi. Yang antara lain dapat dilacak dari tahun 1819, pada tahun tersebut Bupati Besuki, yang wilayahnya mencakup Bondowoso dan Jember, meningkatkan status Bondowoso dari Kademangan menjadi Karanggan. Kemudian pada ketika pada tahun 1850, Bondowoso ditingkatkan menjadi Kabupaten dan Jember menjadi salah satu distrik dari Bondowoso. Jember statusnya ditingkatkan menjadi Afdeeling pada tahun 1883. Dan berubah menjadi Kabupaten pada tahun 1928¹³.

Akar historis yang menghadirkan Jember sebagai sebuah kabupaten ini, menciptakan sebuah konsep teoritis tentang identitas. Konsep yang dilekatkan adalah “Pendhalungan”¹⁴, yang diartikan sebagai Wadah Besar sebagai metafora dari kondisi Geografis, dimana di dalamnya terdapat berbagai macam Etnik yang bertemu, berinteraksi dan menjalin relasi multikulturalistik. Konsep Pendhalungan merujuk pada kesatuan wilayah tapal kuda, yang dapat dirujuk dari Probolinggo-Lumajang-Bondowoso-Situbondo. Jember menjadi spesifik, dikarenakan adanya kondisi Geografis yang dapat dilekatkan pada Pendhalungan. Permasalahannya kemudian bagaimana diskursus Pendalungan ini dibentuk? Bagaimana Konsekwensi teoritis dan realitas yang terepresentasi didalamnya?

Pertama-tama perlulah mencari akar teoritis dan dari Pendhalungan, dalam konteks ini “*Dhalung*” diartikan dan dirujuk pada konsep “Wadah Besar”. Secara metaforik Wadah Besar ini merujuk pada letak dan kondisi geografis, pada titik ini konsep “*Melting Pot*”, diasumsikan sebagai “*Dhalung*”.

¹² Khusus mengenai pembahasan konsekwensi politis dari sebuah jalan, dalam konteks tulisan ini adalah Jalan Pos yang dibangun oleh Deanles, dapat dibaca pada, Prasetyo, Hery. *The Power of Streets: A Discourse of Power Formation in The Spatial Construction of Urban Streets*.

¹³ *Op.cit.*

¹⁴ Konsep tentang Pendhalungan, setidaknya dapat dirujuk pada karya dari Yusyadi, Hary. *Budaya Pendhalungan” Bentuk Multikulturalitas dan Budaya Antar Etnik*. Dalam Sutarto, Ayu., Dan Yuwana, Sudikan, Setya, (Ed). *Pemetaan Kebudayaan Di Propinsi Jawa Timur” Sebuah Upaya Pencarian Nilai-nilai Positif*. Jember, Biro Mental Spiritual Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Kompyawisda. 2008. Hal 53-70. Wiyata, A, Latief. *Mencermati Kondisi Sosial Budaya Pengungsi Sampit di Kabupaten Jember*. Makalah Seminar “Seminar Kajian Konflik di Kalimantan”. Diselenggarakan oleh LASEMA-CNRS, France, Social Sciences For The Study of Conflict In Indonesia, Proyek Kerjasama CNRS-LIPI, Jakarta 19 Maret 2002. Dan, Raharjo, Christanto P. *Pendhalungan: Sebuah ‘Periuk Besar’ Masyarakat Multikultural*. <http://www.bpsnt-jogja.info/bpsnt/download/PENDHALUNGAN.pdf> Didownload tanggal 1 Oktober 2012, Pukul 10.00 Wib.

Melalui kedua konsep tersebut, posisi teoritis dan konsekwensi darinya perlu ditekankan dan diletakkan pada keruangan Jember.

Dalam konteks ini, posisi geografis tak dapat diletakkan terpisah dari historisitas dan relasi Basis-Struktur. Dhalung, bukan saja sebuah wadah yang didiami secara multi etnis. Yang artinya kedatangan etnis yang dibayangkan selalu dan akan terus-menerus berproses dan menciptakan hibridasi kebudayaan, perlu ditunda dan direfleksikan. Bentang historis menghadirkan ruang diskursif bagi yang politis dalam keseharian, artinya kedatangan subject dalam etnisitasnya, terbentuk secara politis, dalam pengertian bahwasannya dirinya lekat dengan bagaimana dirinya dihadirkan dalam ruang kerja atau ruang yang material. Keruangan dengan materialitasnya membentuk bagaimana subject mengenali dirinya dan dunianya, menempatkan dirinya dan meletakkan jangkauan akan kemampuannya.

Melalui bentuk diskursus yang hadir, subject dengan entisitasnya berada dalam ruang material, dan pluralitas etnis berujung pada bentuk kehadiran pekerja. Konsekwensi dari kehadiran pekerja di Jember, tampak dari bagaimana subject-subject yang lekat dengan ke-Pendhalungannya, direpresentasikan sebagai subject tanpa moralitas. Moralitas tanpa moral, bagaimana hal ini mampu beroperasi?

“*Kardhiman – karepa dhibhik man-menyaman –, kardhi – karepa dhibhik*”, merupakan konsep yang merujuk pada beroperasinya Moralitas tanpa moral, konsep yang berarti kehendak pada dirinya sendiri, kehendak bagi pemenuhan subject. Geopolitik Jember, yang terbentuk dari materialitas dimana subject hadir didalamnya. Hadir dalam keterputusannya dari asal-usul ruang politiknya, hadir tanpa kepastian akan dirinya, dalam kondisi ini subject diletakkan pada bagaimana dirinya berhadapan dengan dirinya dan kondisi material, pada kerja dan alam. Ketika kondisi material yang merepresi tersublim dalam sebuah *Dhalung*, bagaimanakah relasi yang terbentuk didalamnya?

Konsep Hibridasi diletakkan untuk merepresentasikan bagaimana materialitas yang ada tersublimasi dalam sebuah *Dhalung*. Hibridasi mengandaikan adanya sebuah kebudayaan yang terbentuk dari akulturasi beragam budaya dan menghadirkan budaya campuran yang baru. Artinya setiap etnisitas yang ada di dalam *Dhalung*, saling berelasi dan etnisitasnya dilekati dengan *Pendhalungan*¹⁵. Permasalahannya bagaimanakah yang kehendak pemenuhan diri dapat berujung pada penciptaan hibriditas?

Konsep hibridasi¹⁶ diartikan sebagai bentuk dari subjektivikasi subject kolonial. Subject diposisikan memiliki kesadaran akan dirinya dan masa lalunya, akan dirinya dengan siapa yang mengontrolnya, akan dirinya dengan segala sistem pengetahuan yang memposisikan dirinya dalam sebuah ruang sosial. Dari kesadaran yang ada, subject menciptakan praktek yang membedakan dirinya dengan semua sistem yang mengatur dirinya, dengan menampilkan keretakan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Untuk pembahasan mengenai konsep Hibridasi, dapat dirujuk pada Bhabha, Homi, K. *The Location of Culture*. London and New York, Roudledge. 1994. Untuk pembeding baca, Young, Robert, J, C. *Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race*. London and New York, Roudledge. 1994.

dalam ketunggalan sistem pengetahuan penguasa, dengan menghadirkan multiplisitas dalam ambivalensi teks, yang seakan selalu ditampilkan sebagai yang tunggal, pasti dan tanpa celah bagi penempatan subject dengan penguasanya.

Hibridasi seakan berjalan dengan adanya konsep Diaspora¹⁷. Diaspora dimaksudkan untuk melihat bagaimana sebuah etnisitas yang berjarak dan dijarakan dari asal-usulnya. Dengan membedakan dirinya dengan asal-usunya, memecah dan mengaburkan kepastian dan ketunggalan asal-usulnya. Dari bentuk praktek Diaspora, praktek etnisitas yang muncul dan ada akan berhadapan kultus asal-usul.

Dari diskursus Yang Politis pertanyaan yang muncul ialah, Apakah *Pendhalungan* merupakan sebuah *Melting Pot*, bagi sebuah relasi hibridasi? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, konsep *Melting Pot* perlu dibahas terlebih dahulu. *Melting Pot* mengandaikan adanya peleburan dari yang partikular menuju yang universal, yang merepresentasikan sebuah proses inkulsifitas dari yang termaginkan, dengan menghadirkan semangat emansipatoris bagi keseluruhan subjek yang berasal dari beragam etnis, dan menghadirkannya sebagai sebuah entitas yang utuh dihadapan kekuasaan¹⁸. Pembentukan *Melting Pot* menghendaki adanya kesamaan moralitas yang mampu menghantarkan setiap kontradiksi menuju satu bentuk. Dengan asumsi teoritis ini, tentunya *Pendhalungan* tak mungkin disandingkan ataupun dirujukan pada konsep *Melting Pot*, dikarenakan adanya perbedaan bentang scientific, dan tak dapat dirujukan pada kondisi real Jember yang berisi relasi kontradiktif yang tampil dalam pluralitas dan keberjarakan etnis.

Jember sebagai entitas yang bergerak dalam ruang yang politis, berbasis pada kondisi material bentukan kolonialisme, berkonsekwensi pada terbentuknya kesadaran pekerja dengan sistem moralitas yang tertutup pada pemenuhan kehendak bagi dirinya, menuju sebuah kondisi tak berbentuk. Tak berbentuk dikarenakan tidak adanya sebuah gagasan yang mampu menyatukan keseluruhan kontradiksi etnis. Kontradiksi yang hadir berposisi dalam bentuk saling berhadapan dan menunggu untuk dibangkitkan bagi pemenuhan dirinya, pemenuhan subjektivitas Postkolonial.

Subject post kolonial dihadapkan pada kekaburan asal-usul dan dibenturkan pada bentuk-bentuk mistifikasi tanda-tanda universal, sehingga bentuk-bentuk yang tampil dan ditampilkan bergerak dalam bentuk yang lokal dengan kehendak global. Global dalam pengertian yang berkejangkauan dengan lokalitasnya, yang artinya subjek postkolonial yang ada selalu mengambil jarak dari yang Global dan menghadirkan yang global dalam lokalitasnya. Subjek

¹⁷ Untuk pembahasan mengenai konsep Diaspora, dapat dirujukan pada Hall, Stuart. *New Ethnicities*. Dalam, Morley, David, and, Chen, Kuan-Hsing (ed). *Stuart Hall: Critical Dialogis in Cultural Studies*. London and New York, Roudledge. 1994. Hal 442-451. Untuk pembanding baca, Young, Robert, J, C. *Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race*. London and New York, Roudledge. 1994.

¹⁸ Bandingkan dengan “‘melting’ of the particular into the universal, a process represented both as a movement from marginality to inclusion and as an emancipatory individualising of the members of racial and ethnic groups in the ‘difference-blind’ eyes of the state” dalam Bennet, David (ed). *Multicultural States: Rethinking Difference and Identity*. London and New York, Roudledge. 1998. Hal 16.

Postkolonial membentuk praktek kesehariannya dengan melingkupi dirinya dan kesehariannya dengan mengambil seluruh yang terjangkau, sementara pemenuhan dirinya dimaksudkan untuk mendapatkan dirinya dalam bentang Global-global dalam kelokalan yang materialistik.

Tampilnya Jember sebagai ruang politis bagi kontradiksi antar entnis. Sebuah kontradiksi berujung pada bagaimana Jember menjadi sebuah ruang kosong pada relasi penandaanya dan dilekati dengan yang global-global, dilekati dengan yang absurd dan ritualistik, dengan tontonan dan arak-arakan tanpa merujuk pada asal-usulnya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kelimpahruahan tanda yang tak dapat disentuh oleh pemenuhan subject, dan bentuk yang paling kasat mata tampak pada keseluruhan perayaan yang ada didalam Bulan Berkunjung Jember.

Global-Lokal:

Kontradiksi, Pembangunan dan Demokrasi

Kondisi Jember yang terbentuk dari kolonialitas, menciptakan materialitas yang khas, yaitu pada bentuk perubahan Basis-Suprastruktur. Dalam konteks ini, kehadiran Basis-Suprastruktur Jember, tak dapat dilepaskan dengan Globalisasi. Bagaimanakah Jember tampil sebagai keterhubungannya dengan Globalisasi?

Globalisasi diposisikan sebagai bentuk dari bagaimana sebuah dunia dibentuk dari kompleksitas perputaran modal, dimana keruangan yang secara teritorialistik tak lagi menjadi batasan. Globalisasi secara spesifik tentu tidak dapat dilepaskan dari bagaimana kebudayaan barat atau budaya Eropa memulai domonasi pada seluruh wilayah dibelahan dunia, yang artinya: *Globalization is fundamentally a spatial phenomenon; it lies on a spectrum with the local and national at one end, and the (supranational) regional and global at the other*¹⁹. Dengan posisi teoritis tersebut, Globalisasi menandai intregrasi seluruh belahan dunia dalam suatu system ekonomi, yang disebut ekonomi pasar global, pada satu system politik yang disebut system politik demokrasi cosmopolitan, pada satu sistem budaya, yang disebut dengan system budaya pasar/massa²⁰.

Konsepsi teoritis tersebut berujung pada paradoks yang mengandaikan adanya sistem politik yang dominatif yakni pada bagaimana massa melalui demokrasi liberal ditarik pada konsensual yang berbasis pada otoritas suara terbanyak atau mengandaikan adanya kesadaran parsialistik pada individu yang kemudian pada saat yang bersamaan ditransformasikan menjadi komunalitas massa mengambang. Dalam konteks ekonomi menjadi eksploitatif, sebagai konsekuensi dari *Time-Lag*²¹, yang dibentuk sebagai bagian dari percepatan

¹⁹ Held, David. *Globalization, Cosmopolitanism and Democracy: an Interview*. <http://www.polity.co.uk/global/pdf/HELD.pdf>. Di Download tanggal 20 Agustus 2012, pukul 22.00.

²⁰ Konsepsi teoritis yang dipergunakan penulis, merujuk pada materi Kuliah Sosiologi Politik, Departement Sosiologi Universitas Airlangga, dengan Sparingga Daniel sebagai Dosen Pengajar.

²¹ Selengkapnya Baca: Fanon, Franz. 2000. *Bumi Berantakan: Buku Pegangan Untuk Revolusi Hitam Yang Mengubah Wajah Dunia*. Jakarta: Teplok Press.

akumulasi modal bagi negara kolonial. Persoalan monopoli perkembangan dan kepemilikan hak atas teknologi menjadi bagian dari strategi eksploitasi. Dalam konteks relasi kultural, kultur yang diwacanakan menjadi sebetulnya *cultural hegemonic*²², yang menegaskan universalitas selera dan gaya dalam merepresentasikan subjektivitas.

Keterhubungan Indonesia pada umumnya dan secara khusus Jember dalam sebuah tatanan Global, ditunjukkan dengan adanya ketergantungan akan modal asing. Modal yang kemudian dipergunakan secara masif untuk melakukan sebuah konsepsi ekonomi-politik dengan nama “Pembangunan”²³. Melalui dan dengan Pembangunan, pemerintah menerapkan sebuah sistem terintegratif dalam penempatan subject dan pengelompokan subject dalam kategori-kategori sosial, yang artinya Pembangunan mengubah tatanan sosial dari yang bersifat sektoral dan privat menjadi terkontrol dan sentralistik. Kondisi inilah yang meletakkan Pembangunan dalam *Mode of Orality*, dimana kehadiran negara berkeserba hadir dalam tatanan bahasa dan sistem pengetahuan²⁴, sehingga penempatan kategori dari yang material dan yang sosial selalu dan berada pada kategori negara.

Tidaklah cukup meletakkan negara dalam keterhubungan pada Yang Global sebagai bentuk negara Otokratif, hal ini dikarenakan adanya bentuk Demokrasi. Meskipun bentuk dan strategi negara mempraktekan Demokrasi patut dicermati²⁵, khususnya pada tiap era kepemimpinan Presiden RI. Lalu apakah praktek Demokrasi yang tak dapat dilepaskan dari relasinya dengan Yang Global, mampu menghadirkan dan memberikan ruang bagi Yang Lokal?

Peristiwa mundurnya Presiden Soeharto dengan sistem pemerintahan terintegratifnya dan kemunculan Era Reformasi menjadi titik penting dalam melihat Demokrasi dan Praktek Pluralitas. Dari kedua peristiwa tersebut, kontradiksi antara yang Nasional dengan yang Lokalistik, antara entitas kesukuan, Agama, dan entitas-entitas kontradiktif, tampil dan hadir tak hanya dalam sebuah kontestasi, tetapi kehadirannya seringkali berada dalam bentuk yang saling berhadapan dan berkehendak menempatkan dirinya sebagai yang benar. Dengan kondisi ke-Indonesian ini, apakah mungkin Demokrasi yang dipraktekan telah mengambil dan mempraktekan semangat *Cosmopolitanism*?

Demokrasi Cosmopolitanism membayangkan adanya subject yang berkesadaran diri pada bentuk universalitas dirinya. Bentuk universalitas akan

²² Selengkapnya Baca: Gramsci, Antonio. 1992. *Selections From The Prison Notebooks*. Edited And Translated By Hoare, Quintin And Nowell Smith, Geoffrey. New York.

²³ Untuk pembacaan mendetail tentang bagaimana modal menjadi kekuatan yang membentuk sistem ekonomi politik di Indonesia, baca, Robinson, Ricard. *Indonesia The Rise Of Capital*. Jakarta-Kuala Lumpur, Equinox Publishing, 2009. Dan bandingkan dengan Ransom, David. *The Berkeley Mafia and the Indonesian massacre*. *Ramparts* 9 (4): 27–29, 40–49. 1970.

²⁴ Pembahasan mengenai konsep *Mode of Orality*, baca Prasetyo, Hery. *Sketsa Mode of Orality: Sebuah Upaya Pembentukan Praktek Etika*. In Falk, Ian, Eko Handoyo, dkk (ed). *Proceeding of Internasional Seminar; Moralitas Dalam Pembangunan, Kontribusi Etika Dalam Pembangunan*. Semarang: Widyakarya dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Semarang. Page 53-60.

²⁵ Untuk pembacaan mengenai Praktek Demokrasi, dapat dibaca lebih lanjut pada, Faith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Jakarta-Kuala Lumpur, Equinox Publishing, 2007.

dirinya sebagai manusia, dengan moralitas kemanusiaan, yang tidak menarik dan mempertajam perbedaan pada bentuk-bentuk acidental, melainkan merujuk pada penyatuan dalam perbedaan. Yang artinya *Cosmopolitanism* merupakan proyek politis yang mengedepankan pendekatan kulturalistik untuk mencari keserempakan gerak heterogen dalam kehadiran subject.

Permasalahan kemudian muncul ketika setting-setting Basis-Struktur dinegasikan adanya. Negasi yang menempatkan Negara, Pasar dan Civil Society dalam keterhubungan fungsionalistik yang membayangkan: State (negara) sebagai sebuah himpunan yang terikat secara institusi pemerintah yang bergerak secara administratif dari sebuah populasi secara geografis, penguasa diakui oleh negara lain melalui hukum internasional. Masyarakat sipil adalah satu konsep yang lebih spesifik dibanding 'masyarakat'. Institusi masyarakat sipil semua mempunyai suatu aspek politik kepada mereka. Masyarakat sipil mengacu pada kumpulan asosiasi warga negara yang suka rela seperti bisnis, organisasi media, gereja, badan profesional, partai politik, golongan berpengaruh dan serikat buruh. Asosiasi ini menikmati berbagai derajat tingkat otonomi dari status. Yang sangat penting, institusi sipil masyarakat dapat bertindak sebagai nada pengiring kepada status kekuasaan dan mereka adalah para aktor politik, melindungi, dan mempromosikan minat tentang anggota mereka.

Relasi antara negara (state) dengan civil society adalah, civil society membentuk negara dengan mengaspirasikan ide-idenya melalui jalur yang dilegalkan oleh negara. Sedangkan negara mengarahkan civil society melalui perundang-undangan. Relasi antara negara (state) dengan market adalah, negara memfasilitasi pasar melalui perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan negara, sedangkan market membingkai fasilitas diberikan negara, sesuai dengan kebutuhkannya. Relasi antara market dengan civil society, market melakukan penghisapan pada civil society, untuk kepentingan bergeaknya kapital. Kapital akan terus bergerak apabila civil society menginformasikan kebutuhan mereka, sedangkan kebutuhan civil society-pun dikonstruksi market.²⁶

Sebagai contoh dengan apa yang terjadi di Jember, ketika kehadiran dirinya tampak sebagai yang natural dan tak terelakan sebagai sebuah konsekuensi dari perubahan bentuk demokrasi pasca kehancuran Rezim Soeharto, dan menghadirkan semangat kembali ke lokal dengan desentralitasnya²⁷. Massa yang dikonstruksi menjadi berkepatuhan pada kekuasaan yang terpusat dan direpresentasikan pada elit lokal, tak lagi menemukan bentuk kepastian akan kepatuhannya. Heterogenitas yang ada dan terus menerus dibungkam, tak lagi tampil sebagai yang tertutup pada kebungkamannya, disisi lain ledakan kehendak ini dihadapkan pada bagaimana massa dipertarungkan oleh elit lokal. Sementara kekuasaan yang secara legal formal ada, tak lagi mampu menjangkau keseluruhan heterogenitas.

²⁶ Sparingga, Daniel. Ibid.

²⁷ Mengenai permasalahan-permasalahan yang hadir dalam praktek berdemokrasi di Indonesia, dapat dibaca pada. Hadiz, Vedi R. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford-California, Stanford University Press. 2001. Bandingkan dengan Collins, Fuller, Elizabeth. *Indonesia Betrayed How Development Fails*. Honolulu, University of Hawai'i Press. 2007. Khususnya pada bagian bab 7.

Permasalahan lokalitas yang dinaturalisasi oleh etnisitas dan religi, tampil dengan massa merujuk pada subject-subject yang ditokohkan. Sementara bagi elite yang tak berakar pada yang lokal terpasaksa bermain dengan bentuk materialism, sehingga demokrasi yang hadir dan dipraktikkan, tampil sebagai penegasan adanya reifikasi. Lalu masihkah demokrasi hadir sebagai ruang untuk artikulasi yang heterogen? Terutama pada artikulasi subjek postkolonial, demokrasi menjadi bagian untuk menunjukkan ketertundukannya melalui birokratisasi suara dan pada kepatuhannya pada hegemoni kultural yang merepresentasikan elite tradisional.

Artikel

Judul : **Alun-alun Kota:**
*Tentang Ruang Publik, Artikulasi Dan
Hibridasi Kebudayaan Kaum Muda Jember*

Peneliti : Hery Prasetyo, S.Sos., M.Sosio²⁸

Sumber dana : DIPA BOPTN 2014

Kontak email : Heryprasetyo83@gmail.com

Abstract

Development and uneven development, two things that compete each other. But today, even those can not get closer enough. The problems surround on how a region with its local diversity no longer support each other. How could this be happened? And how regionality is positioned in the context of autonomy,

²⁸

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember

decentralization and democratization? This essay focus on the appearance of those social condition. A condition which is assumed to be center on local necessity completeness and the solution of local problems through a direction of sustainable development with the involvement of Civil Society as a development direction controler. Researcher placed Jember as a study center where democraton problem becomes complicated and complex. Meanwhile, the Civil Society posistion do not emerge its significant ability yet and local elites are having a problem in the diversity of social spaces. A concept of democracy that give priority to civil political consciousness ends to how political concept is reduced to direct vote celebration. In another side, this reduction leads the civil to lack of self knowledge as civilian and how they vis a vis the state. Another problem is how market rises as political economic force. In focusing to democracy and daily political practices of the civil, researcher conclude the consequence of how a condition of development and uneven development are constructed.

Keywords: *daily political practices, democracy, development, uneven development*

Introduction

Discourse of development appear in the range of discursive between a knowledge and an idea system that support. Through the assumption of unseparate between both, various cutting off of theory and practice always emerge and interesting to think. With that spirit, this essay is arranged and meant to introduce idea about practices of democracy and development.

Democracy is positioned as practical model to the politics which appear as discursive space for subject of the state. In this favor, democracy exists and always change to extend a form and that form which is faced to democracy are local and particular entity. It means that democracy is not only reduced become practices of democracy problems when vis a vis non democracy political system, but by questioning the existance of democracy itself. Problems of democracy will emerge historical ranges about Modernity Project in placing Universal Human and Their Existent²⁹ so that democracy existance always meant particularistic-local

²⁹ In this context, the writer refers to how the idea of modern human existance that brave to lead his knowledge or ratio for the forming of universal space. in Kant's understanding, condition of modern human is embeded with the concept of Enlightenment and his Universal Space is embeded

against universalistic-global. The question later is how are relations which built from that opposition today?

To discuss and arrange a narration for the question above, researcher placed Jember as analysis base. This essay did not mean present Jember as a single form but to apper it as a discursive space for development and democracy. Whereas the method used is discourse³⁰. With discourse the researcher want to present Jember as a space and reality which are formed through opposition between Power/Knowledge that emerge as daily practices that means as a condition for the appearance of Jember with its historicity and place subject at Local-Global complex relation.

This article meant to introduce a democracy discursive and The Politics in unseparate Local-Global. The important point from this article is Jember appeared in a colonial condition. This refers to daily activities which exist range, construct subject consciousness and spirit of Jember as a postcolonial consciousness.

Kerangka Metodologi

Artikel ini dimaksudkan untuk membicarakan narasi yang tersusun dalam keseharian subjek postkolonial. Dalam keseharian subjek, subjektivitas yang dibentuk dalam narasi yang berbasis pada kuasa/pengetahuan ditempatkan sebagai ruang bagi kemunculan subjektivitas yang disubjektifikasi, artinya kehadiran diri subjek berada dalam dan melalui narasi yang tersusun dalam keseharian subjek. Dalam pengertian lain, konteks ini merujuk pada bagaimana subjek membicarakan dirinya dalam kebiasaan struktur sosial yang menciptakan kemungkinan bagi hadirnya subjek, sementara struktur sosial yang tercipta merupakan bagian dari pertarungan kuasa/pengetahuan yang berbasis pada formasi dan sekaligus transformasi realitas.

Melalui asumsi teoritik tersebut, penulis menyusun narasi yang berakar pada subjektivitas dan bagaimana subjektivitas tersebut dihadirkan sebagai yang diartikulasikan dalam ruang sosial. Dengan mengembangkan kerangka konseptual tentang ruang produksi dan praktik subjek, penulis menempatkan subjek sebagai agen yang menyehari dan berketerakaran pada struktur sosial yang dihidupi dan menghidupinya. persoalan struktur sosial yang ada bagi agen, berkonsekwensi pada bagaimana penciptaan praktik keseharian yang diterima apa adanya, diterima sebagai yang natural tanpa meletakkannya sebagai bagian yang ditempatkan secara politis.

Yang politis menjadi bagian yang secara produktif meruangkan subjek, sekaligus menyusun kesadaran tanpa dipersoalkan adanya. Yang produktif dalam pengertian menghadirkan subjek sebagai agen yang bergerak dan

with Cosmopolitant concept. For further reading, compared with text from Kant, Immanuel. *On History*. Indianapolis, New York. The Bobbs-Merrill, co inc, 1963.

³⁰ Discourse which meant by the writer, refers to Foucault's work where epistemologically, he placed Poststructuralism. This means that Foucault's reading on historicity and texts based on how a history present in the fighting/competition/contestation of Power/Knowledge which continuous place human in his subjectivity, in the completion of his will to power. In the context of this research, it means that democracy always in the subjectivity of existance space and without subject singularity.

mentransformasikan dirinya dengan bermain pada kelimpahan kemungkinan yang hadir dihadapannya. Kelimpahan ini kemudian menjadi bagian yang digerakan dengan preferensi sosiokultural dan disisi lain merujuk pada kebiasaan yang dibiasakan sebagai yang dibenarkan secara sosial. Kebenaran yang dipraktikan oleh subjek, merupakan bagian dari kuasa yang secara politis berada diluar diri subjek dan secara progresif menghapuskan memory akan praktik keseharian sebagai subjek yang berada pada ruang postkolonial.

Dengan melakukan reflektifitas teoritik atas pengalaman dan observasi etnografis, sebagai tektik penggalian informasi. Peneliti menekankan pada informasi yang didapatkan melalui wawancara dan pengalaman selama berada di Jember. Yang kemudian disusun sebagai narasi kesadaran subjek postkolonial di Jember.

Jember and Space of Discursiveness

Researcher had chosen Jember as a discursive space because for example, Jember distance from the center of East Java Province government that moreless than 200 kilometers. It means Jember geopolitically exist outside scope of Province government surveillance, furthermore from Central Government. With the conditon, Jember become discourse space among subjects for their will presenting. It can be seen from various cases inside, from the corruption cases of the local elit until gaps that happen: poverty, agrarian reform, education, health, etc.

Do the problems which exist and happen in Jember have a cosequency to geopolitical problem? Of course those have a consequencey between geopolitical space and socio-cultural economic. In another word, the condition which had happened is society Base-Suprastructure. By introducing Base-Suprastructure problems, Jember can be placed on its existent historical range. In this context, researcher started on colonial practices in Jember.

Historicaly, Jember regionality had been noted by Mpu Prapanca in Negara Kartagama. Mpu Prapanca told the story of King Hayam Wuruk in 1359 in Sadeng region and Kota Bacok where today those two places are called Puger dan Watu Ulo, which lies on south of Jember³¹. Meanwhile in 1679, noted in Demung region –today known as Besuki- there was an escaped from Gowa which landed and stayed until he collected power to co-operate with Trunajaya to attack and conquer Java's ports.³²

Besuki, in Jember historical context was point on how coloniality constructed condition of Basis-Suprastructure. The Dutch despite of expanded area through conquered and co-operated with local government, also started commodity trades. In 1677, the Dutch entered the opium as comodity competed with China's opium traders. Until 1889, the Dutch which had support, one of from China traders, resulted document of opium hunters formation. These hunters co-

³¹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). *Dalam Perkembangan Kabupaten Jember, Buku I, Dokumen Sampai Dengan 1971*. Hal 14-18.

³² Ricklefs, M, C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2009. Hal 162.

operate with local government against opium smugglers, this order reached until Besuki Region. Ten years after this order formed and executed, exactly in 1896 opium trading which belonged to Chinese were bankrupt³³.

Jember not only seen as a region which became market for commodity that brought by foreigners. Jember regionality as a prosperous area, emerged a chance for Dutch to keep exploring and developing Jember as producer for high price valued commodity. From the condition, at least rised migration to Jember. Data which noted in 1870, the amount of Jember residents increased rapidly, from beginning which is only 10.000 persons in 1820 became 100.000³⁴.

The increasing of resident amount in Jember region due to emerge of land partekelir or land which being used by private sector for plantation. It had been noted in 1859 George Birnie established first tobacco plantation³⁵. With the opening of plantation, it pushed the needed of laborer and speed of production and distribution means. To accelarate distribution process, the Dutch built railroad track in the end of nineteenth century, from Surabaya- Probolinggo-Lumajang-Klakah-Jember-Bondowoso-Panarukan-Situbondo until Banyuwangi³⁶.

Waves of coming laborer to Jember was dominated by Java Mataraman ethnic which in the beginning work as railroad track worker that later they inhabitant in field rice areas. While the coming of Madura ethnic in Jember as worker who worked or being worked for plantation areas and tobacco warehouses. Beside those two ethnics that were came and brought about, there was another like Osing which have bloodlines with Blambangan Kingdom. Many of Osing ethnic inhabited Puger area³⁷. In the range of Jember historical regionality, ethnics which came to Jember were not only Java and Madura but also Osing and Bugis that entered through Besuki region. Whereas in materialistic development, Jember turned into an area which came by because of the opening chances to accumulate capital as the European, Far East and China.

Rethinking The Contradiction of Cultural Origin

Kontradiksi akan diri yang terbentuk dalam ruang politis dengan mempertimbangkan asal-usul kultural dan bagaimana hal tersebut diartikulasikan dalam praktik keseharian subjek, tampak naif untuk dibicarakan. Terutama ketika Jember dilihat sebagai yang hari ini muncul dalam imaje motropolis dan elitis. Sementara secara kuantitatif persoalan real yang berkaitan dengan kemiskinan, angka buta huruf, ibu meninggal saat melahirkan, dll, masih jamak terjadi. Persoalan ini merujuk pada bagaimana Jember sebagai ruang

³³ Problems of opium trading and its nextwork in Java can be read further in James, R. Opium to Java: Jawa dalam Cengkraman Bandar-Bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910. Yogyakarta, MataBangsa, 2000.

³⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). *Ibid.*

³⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). *Ibid.* Compared to Yuswadi, Hary. *Melawan Demi Kesejahteraan: Perlawanan Petani Jeruk Terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Jember, Kompyasida, 2005. Khususnya pada Bab II “Jember dan Perkebunan Belanda”.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

yang dihidupi oleh ragam etnis hendak diligitimasi sebagai yang berdimensi tunggal.

Ragam etnisitas yang kemudian ditiadakan akar differensiasi kulturalnya dan diimajinasikan menjadi adaptif dan pragmatis. Kerangka imajinasi ini bermula dari keseharian subjek yang harus dihadapkan pada kebutuhan hidup tanpa diletakan pada strategi kultural untuk mampu menampilkan dirinya sebagai yang berkekuatan secara sosial. Keengganan untuk melihat akar kultural subjek sebagai yang berhadapan dalam ruang-ruang kontestatif dan saling menjaga ruang kuasanya, berujung pada bagaimana kebudayaan yang terbentuk menjadi bagian dari hybriditas kebudayaan atau apa yang disebut sebagai budaya pandhalungan³⁸.

Konsep kebudayaan yang dibentuk dengan mengintergrasikan totalitas kontradiksi, membentuk sebuah kerangka berfikir yang mengimajinasikan adanya struktur sosial yang mampu mengintegrasikan kesadaran hingga praktek sosial. Isu kebudayaan bersandar pada kerangka struktural fungsional berujung pada bagaimana struktur sosial yang ada dan dibentuk oleh masyarakat mengarahkan pada satu tujuan. Apa yang kemudian terjadi ialah persoalan cara untuk menghadirkannya, dibayangkan berjalan secara naturalistik dengan mengandaikan manusia dan struktur masyarakat mampu berjalan pada dimensi evolusi dengan mengutamakan harmonisasi nonkonflikual.

Secara historis Jember lekat dengan sejarah konfrontasi etnisitas, yang tampak ditiadakan dari memory kolektif. Sebagai contoh tentang konflik tanah yang berakar pada migrasi tenaga kerja dari Madura. Kedatangan tenaga kerja Madura dipergunakan untuk memenuhi kekurangan lapangan pekerjaan yang defisit pasca diterapkannya sistem tanam paksa dan pembukaan lahan-lahan perkebunan swasta oleh Belanda. Jember yang dibayangkan menjadi lahan kosong pasca dijatuhkannya kerajaan Blambangan dan dengan terpusatnya wilayah persebaran penduduk, hal yang memungkinkan untuk dilakukan dalam memenuhi defisit tenaga kerja ialah dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar wilayah Jember. Pulau Madura dengan kondisi geografis diperparah dengan penerapan sistem tanam paksa, sehingga membuat petani Madura memilih berkerja pada sektor perkebunan yang dikelola oleh Belanda³⁹.

Ketika mereka memasuki wilayah baru yang ada di daerah Jawa Timur, penciptaan kultur perkerja yang tidak memiliki apapun selain tenaga dan etos kerja membuat etnis Madura menjadi bagian dari sistem kerja kolonialisme.

³⁸ Concept of Pendhalungan, at least can be refered from the works of Yusyadi, Hary. *Budaya Pendhalungan*” Bentuk Multikulturalitas dan Budaya Antar Etnik. In Sutarto, Ayu, and Yuwana, Sudikan, Setya, (Ed). *Pemetaan Kebudayaan Di Propinsi Jawa Timur*” Sebuah Upaya Pencarian Nilai-nilai Positif. Jember, Biro Mental Spiritual Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Kompyawisda. 2008. Hal 53-70. And Wiyata, A, Latief. *Mencermati Kondisi Sosial Budaya Pengungsi Sampit di Kabupaten Jember*. Seminar working paper “Seminar Kajian Konflik di Kalimantan”. Held by LASEMA-CNRS, France, Social Sciences For The Study of Conflict In Indonesia, Proyek Kerjasama CNRS-LIPI, Jakarta 19 Maret 2002. Also, Raharjo, Christanto P. *Pendhalungan: Sebuah ‘Periuk Besar’ Masyarakat Multikultural*. <http://www.bpsnt-jogja.info/bpsnt/download/PENDHALUNGAN.pdf> Downloaded at 1st October 2012, time 10.00 WIB.

³⁹ Data dari Jurnal Koseba.

Berbeda dengan kaum pribumi yang berakar pada tradisi Jawa kuno sisa kerajaan Blambangan dan dengan didatangkannya tenaga kerja dari daerah Jawa Mataraman, etnis ini distereotipe dengan mitos pemalas⁴⁰. Dibentuknya mitos pemalas secara diskursif dimaksudkan pada kesadaran diri akan adanya kehidupan yang berkelompok dan berorientasi pada cara produksi yang feodal atau terikat pada tanah dan keluarga. Sementara etnis Madura yang berada pada ketiadaan struktur feodal yang mengikat, mereka berkerja dan membuka lahan disekitar perkebunan.

Dalam konteks pembukaan lahan, mitos yang dikembangkan oleh etnis Madura ialah adanya pertapaan yang dilakukan oleh sesepuh mereka. Dan dari pertapaan yang dilakukan didapatkannya petunjuk semacam sinar terang yang menuntunnya untuk berjalan mengikuti hingga sinar tersebut jatuh. Lalu pada wilayah tersebut dibukanya lahan untuk memulai hidup. Mitos ini menjadi berbeda dengan asal-usul historis kedatangan mereka, tetapi hal ini dipergunakan sebagai cara untuk membangun kesadaran akan ruang kuasa dalam meneguhkan subjektifitas etnis Madura sebagai pendatang yang terikat pada keluarga.

Sistem pembukaan lahan disekitar lahan perkebunan dan keterikatan pada keluarga serta kebanggaan akan diri, berujung pada penduplikasian sistem rumah tanean lanjang⁴¹ sebagaimana di Madura. Sistem penataan ruang berkonsekwensi pada pembentukan karakter yang berorientasi pembentukan kehormatan keluarga dan menciptakan ruang konflikual. Disisi lain dengan diterapkannya sistem tata kelola yang berbasis pada pembentukan desa, maka model perumahan yang berkarakter etnisitas Madura, perlahan mulai satuan kedalam desa. Persoalan lain kemudian yang mengmuka ialah tanah-tanah yang dibuka sebagai lahan pertanian dan perkebunan menjadi bagian yang diperebutkan.

Secara kultural para para penggarap memiliki ligitimasi asal-usul yang menjadi berbeda dengan legalitas hukum. Kondisi ini membawa pada persoalan konflikual yang kemudian membuat pada penggarap lahan memilih untuk medeligasikan urusannya tanpa mereka tahu kompleksitas permasalahannya, dikarenakan terbatasnya akses dan pengetahuan yang dimilikinya. Secara sosiologis, persoalan pendelegasian dan kehadiran negara dalam menata objek kultural, menunjukkan adanya kontradiksi antara kehidupan yang secara kultural dijalani dengan legalitas dan kuasa negara. Yang kemudian direduksikan pada pembentukan garis demarkasi antara yang sosial dan menyehari dengan negara yang politis dan legal formal.

Hadirnya negara dengan keterbatasan jangkauan ruang kuasanya, berkonsekwensi pada bagaimana kehadirannya direpresentasikan dalam tafsiran dan praktek elite, yang diwacanakan sebagai bentuk kekuasaan yang dimaksudkan untuk menopang atau memberikan basis untuk berkuasanya elite. Dalam konteks ini, kehadiran negara tidak dalam bentuk representasi yang

⁴⁰ Alatas

⁴¹ Bandingkan, Wiyata, A.Latief. 2002. *Carok, Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta, Lkis. Dengan, Hastijanti, Retno. *Pengaruh Ritual Carok Terhadap Permukiman Tradisional Madura*. *Dimensi Teknik Arsitektur* Vol. 33, No. 1, Juli 2005: 9 - 16

homogen melaiikan tersebar dalam keragaman kehendak elite. Hal ini membentuk ruang-ruang diantara, yang hendak mengintipelasi kehadiran massa. Meskipun ruang-ruang diantara tersebut berada pada materialitasnya, tetapi kehadiran dalam bahasa dan pengetahuan untuk mengerakannya sebagai elemen kesadaran dibentuk dalam kehendak elitisme.

Berbeda dari wacana ruang antara⁴² dalam wacana postkolonial Bhabha, yang membentuk subjektivitas dalam konsep “mastering the master”, sebagai sebuah konsekuensi adanya hibriditas dan ruang dialogis yang dibungkam dalam gerak kolonialitas. Ruang-ruang diantara mengandaikan adanya spesifikasi ruang yang menghadirkan dominasi praktek wacana dengan menghadirkan figur elite lokal yang menjadi patron. Dan kehadiran elite bukan saja menghadirkan differensiasi formasi kultural yang secara diametral membedakannya dengan kekuasaan negara tetapi disaat bersamaan diformasikan untuk meniadakan wacana dari bawah atau praktek dari paralogisme⁴³.

Apa yang terjadi di Jember, dalam konteks pertanian dan perkebunan bukan hanya persoalan “Modernisasi tanpa Pembangunan” sebagaimana digagas oleh Mazhab Bogor⁴⁴.

The Politics: Region Space and Myth of Identity

Jember in the context of growth and region development is an area which originated from a production space. Maximization of space production which held by the Dutch ended to the development of Jember region. Space production in this context presents existence of production means that the form is worker/laborer which were brought about, making of transportation means, both railroad track and Anyer-Panarukan land track⁴⁵.

It is important to note that Jember development as a Region did not happened by itself. There were administrative stages that accompanied and formed Jember as a space production. For example that can be traced in 1819, in that year A Region Chief of Besuki, which the area covers Bondowoso and Jember, increased Bondowoso status from Kademangan to Karanggan. And later in 1850 Bondowoso was raised to be a region and Jember became one of

⁴² Bhabha, Hommi. 1996. *Culture's In- Between*. In, Hall, Stuart., and, Du Gay, Paul. “*Questions of Cultural Identity*”. London: Sage Publications. Bandingkan dengan, Rutherford, Jonathan. 1990. “*The Third Space*.” Interview with Homi Bhabha. In Rutherford, Jonathan, (ed). *Identity: Community, Culture, Difference*. London: Lawrence and Wishart, 207-221.

⁴³ Dalam konteks konsep Paralogi, bandingkan dengan Lyotard, Jean-François. 1984. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Translation from the French by Geoff Bennington and Brian Massumi. Foreword by Fredric Jameson. Minneapolis: University of Minnesota Press.

⁴⁴ Dalam konteks “Modernisasi tanpa Pembangunan”, selengkapnya baca; Lutfhi, Ahmad Nashih. 2011. *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor*. Yogyakarta: Sains Sajogyo Institute dan Pustaka Ifada.

⁴⁵ Particularly on the discussion of political consequences from streets, in this writing context is the Post Street which was built by Deandles can be read at Prasetyo, Hery. *The Power of Streets: A Discourse of Power Formation in The Spatial Construction of Urban Streets*. (Working Paper in Graduate Student International Conference III, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2011).

Bondowoso's district. Jember status was raised became Afdeeling in 1883. And then turn into Region in 1928⁴⁶.

Historical root which presented Jember as a Region created a theoretical concept of identity. Concept which is embeded is "*Pendhalungan*" which meant as a huge place for metaphor of geographic condition. Inside of this huge place there are various ethnics meet, interact, and having multiculture relations. *Pendhalungan* concept refers to the unity of Horseshoe area which can be refered from Probolinggo-Lumajang-Bondowoso-Situbondo. Jember became spesific because geographical condition that can be attached to *Pendhalungan*. The problem next is how the discourse of this *Pendhalungan* being formed? How is the theoretical consequence and reality that is represented inside?

First, it is needed to find theoretical root from *Pendhalungan* concept, in this context "Dhalung" means and refers to "Huge Place" Metaphorically, Huge Place refers to geographical position and condition. At this point, the concept of "Melting Pot" is assumed as "*Dhalung*". Through those both concepts, theoretical position and consequence from it need to be concerned and put in Jember spacialty.

In this context, geographical position can not be placed separately from historicity and Base-Suprastructure relation. "*Dhalung*" not only a place which is inhabited multi-ethnically. Which meant that the coming of ethnic which imagined always and will continually to process and create cultural hybridation need to be postpone and reflect. Historical range presents discursive space for the politics in daily, it means that the coming subject in his ethnicity is presented in work space or in material space. Spacialty with its materiality forms how subject recognize himself and his world, place himself and put the range of his ability.

Through discourse form which presents, subject with his ethnicity is in material space. And ethnics plurality edges to the form of worker presentation. A consequence from the worker presentation in Jember appear on how subjects that embeded with their "*Pendhalungan*" are represented as subjects without morality. Morality without moral, how can this able to operate?

"*Kardhiman – karepa dhibhik man-menyaman –, kardhi – karepa dhibhik*" are concepts that refer to the operation of morality without moral, concepts which means the will to the self, the will for fulfilling subjects. Jember geopolitic was formed by materiality where subject presented inside of it. This subject presented in his cutting off from origins of his political space, presented without certainty on himself. In this condition, subject was put on how he faced himself and material condition to the work and nature. When material condition that repressed was sublimated in a "*Dhalung*", how is the relation which formed inside?

Hybridation concept is put to represent how materiality which exist is sublimated in a *Dhalung*. Hybridation supposes a new culture which is formed from various culture aculturation and presents a new mix culture. This means that every ethnicity which exist in *Dhalung* relates each other and its ethnicity is

⁴⁶ *Op.cit.*

embedded with *Pendhalungan*⁴⁷. Problem emerges then, how the subject which his will of self fulfillment can be end on hybridity creation?

Concept of hybridation⁴⁸ means as a form of colonial subjectivity. Subject is positioned to has conscioueness of himself and his past with who had control over him and all of knowledge system which positioned him in a social space. From the existing consciousness, subject created practices that differentiated himself with all the systems controled him by appearing a crack in a single knowledage system of Ruler. This was done by presenting multiplicity in the text ambivalency that as if always appear as a single, certain and without a crack for placing subject with his Ruler.

Hibridation as though run with Diaspora concept⁴⁹. This concept means to know how a gap entity was gaped from his origins by differentiated himself with his origins, cracked dan blurred the certainty and singularity his origins. From practical form of Diaspora, ethnicity practice that emerge and exist will vis a vis cult of origins.

From The Politics discourse, question that appear is whether *Pendhalungan* is a Melting Pot for a relation of hybridation? Before answering such question, the melting pot concept is needed to discuss first. Melting Pot supposes a fuse from particular toward universal which represent a process of inclusivity from the marginilized by presenting an emancipatory spirit for all subjects which origins from various ethnics and present them as a total entity infront of the power⁵⁰. The formation of melting pot requisite sameness of morality that able to lead every contradiction towards a single form. With this theoretical assumption, it is for sure that *Pendhalungan* is imposible to be sided and refered to the concept of melting pot because of any different scientific range. It also can not be refered to the reality of *Jember* that content of contradictive relation which appear in the plurality and ethnics gap.

Jember as an entity moves in the political space based on material condition that formed by colonialism, consequently to laborer consciousness formation with closed moral condition completeness of the self towards an unformed condition. This unformed condition because of there was no idea that

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ For discussion of Hybridation concept can be refered at the work of Bhabha, Homi, K. *The Location of Culture*. London and New York, Roudledge. 1994. Compared to Young, Robert, J, C. *Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race*. London and New York, Roudledge. 1994.

⁴⁹ For discussion of Diaspora concept can be refered at the work of Hall, Stuart. *New Ethnicities*. In Morley, David, and, Chen, Kuan-Hsing (ed). *Stuart Hall: Critical Dialogis in Cultural Studies*. London and New York, Roudledge. 1994. Hal 442-451. For comparison read Young, Robert, J, C. *Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race*. London and New York, Roudledge. 1994.

⁵⁰ Compare with “‘melting’ of the particular into the universal, a process represented both as a movement from marginality to inclusion and as an emancipatory individualising of the members of racial and ethnic groups in the ‘difference-blind’ eyes of the state” in Bennet, David (ed). *Multicultural States: Rethinking Differance and Identity*. London and New York, Roudledge. 1998. Hal 16.

being able to unite every ethnic contradictions. This means a contradiction which vis a vis and wait to be raised for self completeness, that is Postcolonial subjectivity completeness.

Postcolonial subject faced to the blurring of origins and is collided to mystification forms of universal signs so that forms which appear and were appeared move in the local form with the global will. This global in its means is to have scope with its locality in which postcolonial subject always take distance from the Global and present it in its locality. Postcolonial subject forms daily practices by surrounding himself and his routines by taking every scope, meanwhile self completeness meant to get himself into range of globals in materialistic local.

Jember appears as political space for contradiction among ethnics. A contradiction that led to how Jember became an empty space of signs relation and was embedded with the globals which absurd and ritualistic with spectacles and carnivals without refer to its origins. This could be happened because of the signs overflowing that can not be touched by self completeness. And the most seen of form is the whole celebration in *Bulan Berkunjung Jember*.

Global-Local: Contradiction, Development and Democracy

Jember condition which is formed by colonialism, creates its special typical of materiality that is a changing form of Basis-Suprastructure. In this context, the present of Jember Basis-Suprastructure can not be detached from Globalization. How does Jember appear as a discursivity with Globalization?

Globalization is positioned as a form on how a world is constructed from capital circulation complexity where spacially theoretically is no more boundaries. Globalization specifically of course can not be released from how western culture or European culture started to dominate the whole part of world. This means: *Globalization is fundamentally a spatial phenomenon; it lies on a spectrum with the local and national at one end, and the (supranational) regional and global at the other*⁵¹. With that theoretical positioned, Globalization signs integration of the whole part of world in an economic system called global market economic, in a political system called cosmopolitan democracy politic system, in a cultural system called mass/market cultural system⁵².

The Indonesian connectivity in Global order is showed by the dependency of foreign capital. The capital which then used massively to act politic-economic conception named "Development"⁵³. Through and with development, the government applied an integrated system in placing and grouping subject into

⁵¹ Held, David. *Globalization, Cosmopolitanism and Democracy: an Interview*. <http://www.polity.co.uk/global/pdf/HELD.pdf>. Downloaded at August, 22nd 2012, time 22.00 WIB.

⁵² Theoretical conception that is used by the writer referred to Daniel Sparingga in lecture subject matter of Political Sociology, Department of Sociology Airlangga University.

⁵³ Further detail reading about how capital becomes the major force that formed political economic system in Indonesia, read Robinson, Ricard. *Indonesia The Rise Of Capital*. Jakarta-Kuala Lumpur, Equinox Publishing, 2009. And compared to Ransom, David. *The Berkeley Mafia and the Indonesian massacre*. *Ramparts* 9 (4): 27–29, 40–49. 1970.

social categories which meant that development changed social order from private and sectoral into centralistic and controlled. This condition that put development in *Mode of Orality* where state appearance presents in language order and knowledge system⁵⁴ so that placement of category from material and social always and exist in the state categories.

It is never enough to put state in the connectivity to The Global as form of Autocracy State because of democracy form. Although strategic and form of the state to practice democracy must be concerned⁵⁵, particularly on every leadership era of Indonesia Republic President. Then, is the practice of democracy which can not be detached from its relation with The Global able to present and give space for The Local?

The event of Soeharto retreated as Indonesia President with his integrated-centralistic government and the rise of Reformation Era become important point in seeing Democracy and Pluralistic Practices. From both events, contradictions between the National and The Localistic, between ethnicity, religion and contradictive entities appear and emerge not only in a contestation but often in form which vis a vis and the will to put themselves as truth. With this condition of Indonesia-ness, is it probably that Democracy which is practiced have taken and practiced the Cosmopolitanism?

Cosmopolitanism Democracy imagined the exist of subject which consciences to the form of his universality. Form of universality as a human with humanity morality which did not attract and exacerbate differences to accidental forms but referred to integration of diversity. This meant that Cosmopolitanism is a politic project which priority to culturalistic approach for seeking simultaneity heterogen flows in the present of subject.

A problem arise when Base-Suprastructure settings is negated. A negation which put the State, Market and Civil Society in functionalistic connectivity. It imagined the State as a space which tied institutionally government that flow administratively of a geographical population, Ruler that is acknowledged by other states through international law. Civil society is one of the concepts that more specifically compares to 'society'. All of the civil society institution have political aspect that related to voluntary civil which associated to business, media organization, religion organization, political organization, power group and labor association, etc. These associations benefit from every level degree of relative autonomy status. The most important thing, civil society institution can act as vote gather which can be used by political actors to get their position.

Relation between State and Civil Society is that civil society formed the state by inspiring ideas through legal trajectory of the state. Whereas state lead civil society through constitutions. Relation between satte and market is that state

⁵⁴ The discussion of *Mode of Orality* concept read Prasetyo, Hery. *Sketsa Mode of Orality: Sebuah Upaya Pembentukan Praktek Etika*. In Falk, Ian, Eko Handoyo, dkk (ed). *Proceeding of Internasional Seminar; Moralitas Dalam Pembangunan, Kontribusi Etika Dalam Pembangunan*. Semarang: Widyakarya dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Semarang. Page 53-60.

⁵⁵ Democracy practices can be read further in Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Jakarta-Kuala Lumpur, Equinox Publishing, 2007.

facilitate market through constitutions and policies whereas market frame facilities that are given by state as its necessities. Relation between market and civil society is that market absorbs civil society for the interest of capital flow. The capital will keep on flowing if civil society inform their necessities whereas civil society's necessities are constructed by the market⁵⁶.

As an example with what had happened in Jember when the present of itself appear as a natural and unavoids as a consequence of a democracy changing form pasca Soeharto shattered rezim and present the spirit back to the local with its decentrality⁵⁷. Mass which is constructed becomes docile to central power and are represented with local elite, no longer find certain form of their obediences. Heterogeneity which is exist and continue to be silent no longer appear as a closed to its silent. In another side, the will explosion faced to the mass against local elit. Meanwhile, the legal authority no longer able to range the whole heterogeneity.

Locality problems which is naturalized by ethnicity and religion appear to the mass by referring subjects that are prominent figures. Meanwhile, for the elite which is not rooted from the local is pushed to play with material form so that democracy which present and being practiced emerges as reification emphasis. So, does democracy present as heterogeneity space yet?

Consciousness and Heterogeneity: A Summary

Consciousness and heterogeneity, both are concepts which refer to subject himself and outside. Consciousness meant a form of recognition and self positioning when himself faced to the outside. Meanwhile what are outside himself positioned as objects, the problems is when the objects which outside his range is ranged by others subject outside him, and subject faced with others. When the subjects are faced each other and objectify each other, how consciousness are formed?

Consciousness are formed through knowledge system which positions and makes relation between subject and object, and between the world and its materiality. When consciousness is formed from knowledge system, how is Jember positioned? Jember as been positioned before, appear as colonial space with its connectivity to The Global, to the globals and the local. The local as subjectivity centered upn self completeness.

When the center is in the self of subject, the world outside subject is built from subjectivity which takes and distance with subjectivity. Meanwhile, objects relation is taken and translated as the private. The taken objects as the private distance present object as subject's belonging appear in incompleteness of object privatization. Jember appear in it, appear to how elite as a leader or chief of region

⁵⁶ Sparingga, Daniel. Ibid.

⁵⁷ About problems that present in democratic practices in Indonesia can be read at Hadiz, Vedi R. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford-California, Stanford University Press. 2001. Compared with Collins, Fuller, Elizabeth. *Indonesia Betrayed How Development Fails*. Honolulu, University of Hawai'i Press. 2007. Especially in chapter 7.

always faced with the corruption cases. While the mass which should be present as a led to welfare faced with mass politicization.

When elites play on how they have been accepted, chosen, followed by its whole elitism, the mass changed become the mass with its order on a democracy orde. But democracy on what have been practiced in Jember appear as democracy without priority to consciousness as subject that realize can promote himself as citizen with whole consciousness embedes to the whole daily activities. In this point, daily activities rootless from politics to the mass politicization. And formlessness of the mass politicization has will of representation over representation. The mass representation which is represented and controlled by an elite which able to mediate the mass and elite or chief of region, is often tradisional elite which based on ehnicity and leadership religious.

With the consciousness which formed to self completeness and objects placing that are formed from object's incompleteness, placed the mass on dependency with who can control them. The problem is on how then, control and consciousness flowing no longer in the self subjects but in how subjects are moved, mobilized into a ceremonial. If this ceremonial is related with democracy, therefore will creates elite as though controls the whole subjects space. With the rise of elite, as though then democracy and the mass which is controlled is controlably. But control never able to work totally, bureaucracy will never able to order the whole objects heterogeneity which meant that bureaucracy and control will always leave behind residue for discourses to operate.

With the residue from discourses precisely, space of power moves and becomes uncertain on metadiscourses which flow the discourses. This can be seen when an elite has a will to change the mass basis without rest upon material condition. A will of industriality form which is imagined will take the mass on stabil condition and attempts to place the mass as labors. Whereas the will which is taken and faced to metadiscourses appear in the cutting of and rotate to self elite and the mass that is positioned represented by it. This means consciousness and heterogeneity are always exist in the fighting/contestation/competition of power/knowledge which flow and bineristically placed subject as the mass selves.

Daftar Pustaka

Althusser, Louis. 2007. *Filsafat Sebagai Senjata*. Yogyakarta, Resist Books.

Andang, Subaharianto., Anam, Samsul., Setiawan, Ikhwan. 2011. *Menjadi Sang Hibrid: Hibridasi Budaya dalam Masyarakat Lokal*. Jember, Universitas Jember Laporan Penelitian.

Arifiyanti, Jati (2012). *Tesis: Seniman Tradisional di Tengah Popularitas Jember Fashion Carnaval (Studi tentang Konsruksi Kesenian di Kabupaten Jember)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

- Atkinson, Paul. 1994. *The Ethnographic of Imagination: Textual Construction of Reality*. New York, Routledge.
- Bhabha, Homi. 2007. *The Location of Culture*. New York, Routledge.
- Burhan, Arifin, Edy. 2006. *Pertumbuhan Kota Jember Dan Munculnya Budaya Pandhalungan*. Makalah dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Sejarah VIII, di Jakarta Callinicos, Alex. 1976. *Althusser's Marxism*. London, Pluto Press .
- Chakrabarty, Dipesh. 1992. *Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks for "Indian" Pasts?*. *Representations* 37(1):1-26.
- Chakrabarty, Dipesh. 1998. *Minority Histories, Subaltern Pasts*. *Postcolonial Studies*, Vol 1, No 1, pp 15-29.
- Chakrabarty, Dipesh. 2000. *Subaltern Studies and Postcolonial Historiography*. *Nepantla: Views from South* 1.1. 9-32.
- Clark, Helen. *People-Centered Development. Empowered Live, Resilient Nations*. 2001. United Nations Development Programme UNDP in Action – Annual Report 2010/201. New York, Office of Communications/Partnerships Bureau United Nations Development Programme.
- Clifford, James. , and, Marcus, George (ed). 1986. *Writing Culture: The Poetics and Politics Of Ethnography*. California, University California Press.
- Damajani, Dhani, RR. 2007. *Informalitas dan Formalitas Pada Ruang Terbuka Publik: Studi Kasus Lapangan Gasibu Bandung*. *Dimensi Teknik Arsitektur* 2 (2). Hal 164-171.
- Fikry, Ali, Riza. 2013. *Hubungan Dialogis Tim Pembina Pedagang Kaki Lima dalam Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Alun-alun Sidoarjo*. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1 (1). Hal 94-100.
- Gramsci, Antonio. 1992. *Selections From The Prison Notebooks Of Antonio Gramsci*. Edited And Translated By Hoare, Quintin., And, Nowell, Geoffrey, Smith. New York, International Publishers.
- Habermas, Jürgen. *Ruang Publik; Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Yogyakarta, Kreasi Wacana. 2008. Hal 41.

- Handinoto. 1992. *Alun-Alun Sebagai Identitas Kota Jawa, Dulu Dan Sekarang*. Dimensi 18 September. Hal 1-15.
- Heryanto, Ariel. 2007. *Can There Be Southeast Asians in Southeast Asian Studies?*. Dalam, Sears, Laurie J (ed). *Knowing Southeast Asian Subjects*. Singapore, NUS Press and University Of Washington Press.
- Holquist, Michael. 2009. *The Role Of Chronotope In Dialog*. Dalam, Junefelt, Karim. Dan, Nordin, Pia (Ed). *Proceedings From The Second International Interdisiplinary Conference On Perspectives And Limits Of Dialogism In Mikhail Bahtin*. Sweden, Stockholm University, Departement Of Scandinaviaa Languanges. Hal 9-17.
- Jannah, Raudlatul. (2010). *Tesis: Jember Fashion Carnaval (JFC). Identitas Kota Jember, dan Diskursus Masyarakat Jaringan*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Jurriëns, Edwin. 2006. *Ekspresi Lokal Dalam Fenomena Global: Safafi Budaya dan Migrasi*. Jakarta, LP3ES dan KITLV.
- King, Victor K., dan Wilder, William, D. 2012. *Antropologi Modern Asia Tenggara: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Loomba, Ania (Second Edition). 2005. *Colonialism/Postcolonialism*. New York, Routledge.
- Maraña, Maider. 2010. *Culture and Development: Evolution and Prospects*. Bilbao, Spain, UNESCO.
- McNutly, Lori. 2006. *The World Urban Forum. Vancouver Working Group Discusstion on Paper*.
- Newberry, Jan. 2013. *Back Door Java: Negara, Rumah Tangga dan Kampung di Keluarga Jawa*. Jakarta, KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
- Prasetyo, Hery. 2012. *Development And Uneven Development (Does Democratization Work?)*. Dalam *Proceding International Conference on Decentralization (ICODEC), How Far Decentralization Goes*. Jatinangor. Hal 369-376.
- Prasetyo, Hery. Dan, Vidia, Dien, Rosa. 2013. *Space For Cultural Articulation: Voicing The Lokal In Commodity Transformation*. Dalam *Proceding The*

1st International Conference For Arts and Arts Education On Indonesia (ICAAE). Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta.

- Ranjit Guha. 2000. *On Some Aspects of the Historiography of Colonial India*. . Dalam Vinayak Chaturvedi (ed.). *Mapping Subaltern Studies and the Postcolonial*. London, Verso.
- Raharjo, Christanto P. *Pendhalungan: Sebuah 'Periuk Besar' Masyarakat Multikultural*. <http://www.bpsnt-jogja.info/bpsnt/download/pendhalungan.pdf> Didownload Tanggal 1 April 2014, Pukul 10.00 Wib.
- Shiraishi, Saya, Sasaki. 2009. *Pahlawan-Pahlawan Belia Keluarga Indonesia dalam Politik*. Jakarta, NALAR dan Kepustakaan Populer Gramedia.
- Thomas, D, Peter. 2013. *Hegemony, Passive Revolution and The Modern Prince*. Thesis Eleven 117(I)20-39.
- Todorov, Tzvetan. 2013. *Dasar-Dasar Intertekstualitas: Pergulatan Mikhail Bakhtin Menuju Teori Sastra Terpadu*. Denpasar, Cv Bali Media Adhikarsa.
- Spivak, Gayatri Chakravorty . 1995. *Can the Subaltern Speak?*. Dalam, Ashcroft, Bill., Griffiths,Gareth., and, Tiffin, Helen (Ed). *The Post-colonial Studies Reader*. London, Routledge.
- Wijono, Satro, Radjimo. 2013. *Modernitas Dalam Kampung: Pengaruh Kompleksitas Perumahan Sompok Terhadap Pemukiman Rakyat di Semarang Abad ke-20*. Jakarta, LIPI dan Yayasan Obor Indonesia.
- Wiyata, A, Latief. *Mencermati Kondisi Sosial Budaya Pengungsi Sampit Di Kabupaten Jember*. Makalah Seminar “Seminar Kajian Konflik Di Kalimantan”.
- Wertsch, James V. 2009. *Text And Dialogism In The Study Of Collective Memory*. Dalam, Junefelt, Karim. Dan, Nordin, Pia (Ed). *Proceedings From The Second International Interdisciplinary Conference On Perspectives And Limits Of Dialogism In Mikhail Bahtin*. Sweden, Stockholm University, Departement Of Scandinivaa Languanges. Hal 31-38.
- Wibisono, Bambang. 2007. *Varian Bahasa Orang Madura Di Jember Dalam Komunikasi Lisan Tidak Resmi*. Bahasa Dan Seni. 35 (2). Hal 158-171.

Yuswadi, Hary. 2008. *Budaya Pendhalungan” Bentuk Multikulturalitas Dan Budaya Antar Etnik*. Dalam Sutarto, Ayu,. Dan Yuwana, Sudikan, Setya, (Ed). *Pemetaan Kebudayaan Di Propinsi Jawa Timur” Sebuah Upaya Pencarian Nilai-Nilai Positif*. Jember, Biro Mental Spiritual Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Dan Kompyawisda. Hal 53-70.